



Metro (Hal. 7)

Senin, 9 Maret 2020

Pemkab Belum Laporkan Penyerahan Aset PSU ke Kementerian PUPR



» Pertemuan para pengembang dengan Sekeda Minut.

METRO, Airmadidi- Pemkab Minahasa Utara belum melaporkan penyerahan aset bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) Tahun 2018 kepada dari Kementerian PUPR. Untuk itu Pemkab Minut melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim), Kamis pekan lalu telah menggelar pertemuan dengan pengembang.

Pertemuan tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Minut Ir Jemmy H Kuhu MA me-

wakill Bupati, di ruangan Sekda. Kuhu mengungkapkan sebelum penyerahan asset ke Pemkab Minut, sejumlah hal harus dipenuhi pengembang.

"Ada beberapa item yang harus dipenuhi pihak pengembang, antara lain sarana umum seperti air bersih dan sampah. Setelahnya saya sudah siap menandatangani penyerahan aset tersebut dari pihak pengembang ke pemerintah kabupaten," papar Sekda.

Sementara, Ketua DPD Persa-

tuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Sulut Sonny Mandagi didampingi Wakil Ketua Benigno Polii, Sekretaris eksekutif REI Chres Solambela dan Bendahara Agus Londong mengungkapkan pertemuan tersebut untuk penyerahan aset dari pihak pengembang ke Pemkab Minut.

"Pada dasarnya pekerjaan semuanya sudah selesai, tinggal penyerahan aset ke pemerintah Kabupaten dan untuk itu sudah disetujui dan ditanda-

tangani pak Sekda. Dari Sekda ada beberapa persyaratan umum yang diminta Pemkab dan sudah dilakukan pihak pengembang," jelas Mandagi. Sementara itu menurut Kadis Perkim Minut Oktavianus Tooy SE didampingi Sekretaris Dinas Donald Tinting dan Kabid Perumahan dan Pertanian Vandy Posumah, pertemuan ini dilaksanakan untuk membahas mengenai penyerahan aset dari pengembang ke Pemkab dan yang mendapatkan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dari Kementerian PUPR Tahun 2020. "Dibahas mengenai apa saja kewajiban pengembang untuk pembangunan perumahan yang siap untuk dipasarkan. Antaranya mengenai tersedianya sarana seperti air bersih, listrik, jalan, juga prasaranana umum dan sosial juga termasuk ruang terbuka hijau sesuai ketentuan yang berlaku," urai Tooy.

Diakui Kadis kalau penyerahan aset 2018 belum dilaporkan, maka akan menghambat penyaluran PSU 2020.

"Jadi harus disampaikan dalam waktu dekat ini, karena PSU 2020 sudah dilaksanakan Detail Engineering Design (DED) dan akan dilanjutkan nanti Mutual Check 0% (MC-0) oleh Kementerian PUPR. Setelah disampaikan berkas 2018 maka kemungkinan dari Kementerian PUPR akan turun untuk MC-0 kepada penerima PSU 2020," jelas Tooy.⁽²³⁾